

Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang

Addibul Lutfi¹, Lince Magriasti²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: addibul27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Keltana oleh BPBD Kota Padang. Penelitian ini sangat penting dikarenakan tingginya potensi ancaman bencana di Kota Padang. Penelitian ini memakai pendekatan kuasi kualitatif serta menggunakan metodologi penelitian Simple Research Design (SRD). Teknik pengumpulan data antara lain metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan efektivitas Program Keltana oleh BPBD Kota Padang semakin meningkat, didasarkan pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (Tiara dan Endang, 2022).belum sepenuhnya efektif, karena tidak semua variabel berhasil dilaksanakan secara optimal. Meskipun aspek ketepatan sasaran dalam pemilihan kelurahan serta upaya sosialisasi program menunjukkan hasil yang positif, namun kendala pada pemantauan program dan rendahnya partisipasi masyarakat masih mempengaruhi efektivitas secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini mencakup: a). Faktor internal; seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya sarana pendukung. b). faktor eksternal, yaitu partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan dukungan regulasi, dan lemahnya kemitraan dengan lembaga lain.

Kata kunci: *Efektivitas Program, Program Kelurahan Tangguh Bencana, BPBD*

Abstract

This research aims to describe the effectiveness of disaster resilience subdistrict program conduct by Padang City Regional Disaster Management Agency (BPBD). This research is important due to high potential threat of disasters in Padang City. This study employs a quasi-qualitative approach utilizing the Simple Research Design (SRD) methodology. The data collection methods utilized by the researchers consist of interviews, observations, and documentation. The survey results show that the effectiveness of the Padang City Regional Disaster Management District Program (BPBD) is increasing, based on the theory of program effectiveness put forward by Budiani (Tiara and Endang, 2022). It is not yet fully effective, because not all variables have been implemented optimally. . Even though aspects of targeting accuracy in selecting subdistricts and efforts to socialize the program show positive results,

obstacles to program monitoring and low community participation still affect overall effectiveness. The elements that affect the effectiveness of this. program include: a). Internal factors; such as budget limitations, limited human resources, and lack of supporting facilities. b). external factors, namely low community participation, limited regulatory support, and weak partnerships with other institutions.

Keywords : *Program Effectiveness, Disaster Resilient Village Program, BPBD*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat terjadinya bencana alam yang cukup tinggi karena letak geografis dan geologisnya yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di jalur lingkaran api pasifik, wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik paling aktif di dunia, menyebabkan seringnya gempa bumi dan letusan gunung berapi (Murdiaty et al., 2020). Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan lautan yang lebih besar daripada daratannya, dapat mempengaruhi curah hujan yang tinggi (Afif dan Martin, 2022). Hal ini membuat potensi bencana di Indonesia juga menjadi cukup tinggi dan bervariasi dari berbagai aspek jenis bencana. Salah satu bencana alam yang cukup besar terjadi di Indonesia adalah tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 yang memakan korban jiwa lebih dari 230.000 orang dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di beberapa negara di sekitar Samudra Hindia (Agusintadewi, 2020).

Potensi bencana menjadi fokus utama pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai dampak bencana, berupa korban jiwa maupun kerusakan harta benda. Berdasarkan data BNPB, lebih dari 53. 000 desa atau kelurahan di Indonesia tergolong berisiko tinggi terkena bencana, dari sekitar 75. 000 desa di Indonesia (BNPB MP Bidang Pencegahan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana dan peningkatan kapasitas tanggap bencana masyarakat sangat penting agar dapat mengurangi risiko dan dampak bencana. Oleh karena itu, mitigasi diperlukan berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tindakan pencegahan bencana. Badan yang bertanggung jawab dalam pencegahan bencana di Indonesia adalah BNPB. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, BNPB bertugas menyusun dan menetapkan pedoman pengurangan risiko bencana.

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam mitigasi bencana menetapkan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, yaitu melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) dengan meningkatkan program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB).

Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, kelurahan tangguh bencana (Keltana) adalah kelurahan yang mempunyai keterampilan mandiri dalam membiasakan diri dan tanggap terhadap potensi akan

potensi bencana serta cepat pulih dari dampak buruk suatu bencana kecamatan. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons bencana. Program ini diciptakan untuk mengurangi dampak negatif bencana di Indonesia yang seringkali menimbulkan kerugian besar maupun kecil baik dari segi ekonomi maupun sosial (BPBD Kota Padang, 2016).

Di Indonesia, Sumatera Barat merupakan provinsi dengan risiko bencana yang signifikan karena terdapat tiga sumber utama aktivitas bencana aktif: lempeng megathrust, sesar Mentawai, dan sesar Sumatera Besar (Partuti, T. & Umyati, 2019). Hal ini menyebabkan terjadinya bencana dahsyat di Kota Padang, diantaranya gempa bumi memiliki kekuatan 7,9 Skala Richter (SR) yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Gempa tersebut menelan korban jiwa 1.117 orang di tiga kota dan empat kabupaten di provinsi Sumatera Barat, menurut data Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB). Selain itu, luka berat sebanyak 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, dan juga hilang satu orang. Gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan berat 135.448 rumah, kerusakan sedang 65.380 rumah, dan kerusakan ringan 78.604 rumah, serta kerugian harta benda, sarana dan prasarana. (BPBD Kota Padang, 2019)

Di beberapa Kelurahan Kota Padang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan abrasi menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Banjir sering melanda terutama saat curah hujan meningkat, disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai dan penurunan kapasitas sungai. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah dan infrastruktur serta berdampak pada kesejahteraan warga. Gempa bumi juga merupakan ancaman serius karena Kota Padang berada di kawasan seismik aktif, yang meningkatkan risiko kerusakan besar pada bangunan dan infrastruktur. Selain itu, abrasi pantai di sepanjang garis pantai Kota Padang menyebabkan pengikisan tanah dan kehilangan lahan pesisir, yang berdampak negatif pada komunitas yang tinggal di pesisir.

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, terutama gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Risiko ini disebabkan oleh posisinya yang terletak di sepanjang jalur Sesar Sumatera, yang dikenal dengan aktivitas tektonik yang intens. Untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana tersebut, pemerintah kota telah meluncurkan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB). Program ini dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat melalui berbagai langkah mitigasi, pembinaan, dan pelatihan. Namun, pelaksanaan Program KTB di Kota Padang menghadapi sejumlah tantangan khusus. Masalah yang dihadapi meliputi kekurangan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan tenda darurat maupun dapur umum, serta kurangnya pengecekan berkala fasilitas kesiapsiagaan. Selain itu, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh jumlah sumber daya manusia yang memadai.

Terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota yang berperan memberikan bimbingan dan arahan dalam upaya penanggulangan bencana. Tugas tersebut meliputi pencegahan bencana,

manajemen krisis, pemulihan, dan rekonstruksi secara adil dan berkeadilan. Selain itu, ia berwenang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penanggulangan bencana seperti: Program bantuan bencana desa, pelatihan dan pendidikan masyarakat, dan jasa lingkungan.

Saat ini, jumlah personel yang tersedia masih belum mencukupi, mengakibatkan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal. Begitu juga, pendanaan sangat penting untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Namun, dana yang tersedia di lapangan masih kurang, dan tidak ada dukungan finansial dari BPBD Kota Padang, sehingga mempengaruhi pengecekan berkala fasilitas kesiapsiagaan yang memerlukan biaya besar (Alhadi, 2019). Berdasarkan data yang ditemui dari BPBD terdapat bahwa pada setiap kelurahan yang telah dilaksanakan program kelurahan tangguh bencana tidak mendapatkan pertemuan yang sama diberikan oleh BPBD Kota Padang itu sendiri. Terdapat kelurahan yang mendapatkan pertemuan relative sedikit yang seharusnya mendapatkan 15 hingga 20 kali. Dari beberapa kelurahan yang hanya mendapatkan sedikit pertemuan terdapat kelurahan yang sangat membutuhkan program tersebut, menimbang kondisi dan ancaman akan bencana alam yang terjadi di sana.

Selain itu, meskipun Program Kelurahan Tangguh Bencana tersebut sudah dilaksanakan akan tetapi masih ditemukan permasalahan lainnya, yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan Program Kelurahan Tangguh Bencana, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat memiliki aktivitas dan kesibukan bekerja. masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan Program Keltana yang di diadakan oleh BPBD Kota Padang dikarenakan kesibukan dalam urusan pekerjaannya, terutama para nelayan yang justru paling membutuhkan sosialisasi terkait program kelurahan tangguh bencana tersebut mengingat pekerjaannya yang berisiko tinggi yang berada di daerah zona merah.

Disamping itu, dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana sendiri BPBD juga mendapatkan respons kurang baik dari RT dan RW setempat. BPBD dalam melaksanakan program tersebut ialah mendapatkan respons yang kurang baik terdapat beberapa ketua RT dan RW untuk menyuguhkan data kependudukan serta data lain yang pakai sebagai komponen pendukung dalam penyusunan dokumen rencana evakuasi, rencana kontijensi dan kajian risiko bencana.

Berdasarkan jbaran dari latar belakang dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut, menarik untuk diteliti tentang “Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama di Kota Padang”

METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif semu (quasi qualitative design) (Bungin, 2020). Penelitian ini mengadopsi karakteristik gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan yang lebih condong pada kualitatif tetapi memasukkan beberapa elemen kuantitatif. Bungin (2020) juga

menjelaskan bahwa penelitian quasi kualitatif melibatkan beberapa tahapan yang dikenal sebagai metode simple research design (SRD), yaitu :

- a. Konteks Sosial dan Pertanyaan Penelitian
Pada bagian ini peneliti menentukan konteks sosial yang digunakan dan mengembangkan hipotesa terkait konteks sosial yang dipilih.
- b. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka dilakukan oleh peneliti dengan membaca dan mempertimbangkan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dan berhubungan terkait dengan konteks sosial dan hipotesis yang diberikan.
- c. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data
Pada bagian ini yang dilakukan adalah menimbang-nimbang metode penelitian yang digunakan dan menggunakan metode penelitian tersebut pada pengumpulan data di lapangan.
- d. Analisis Data
Pada tahapan ini adalah melakukan analisis data yang ditemukan di lapangan dan menggunakan teori untuk menganalisis penelitian.
- e. Laporan
Tahap laporan adalah tahap akhir guna melaporkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan meliputi wawancara, dokumentasi, serta tinjauan pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana oleh BPBD Kota Padang

Menurut Ravianto (Hariandja, 2019), efektivitas diartikan sebagai seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan dan sejauh mana hasil yang dicapai memenuhi harapan. Berdasarkan pengertian ini, efektivitas dapat diukur melalui jumlah atau kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Efektivitas merupakan elemen penting dalam sebuah organisasi, yang terlihat dari kemampuan dari suatu badan untuk mencapai tujuan. Suatu kegiatan dianggap efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tercapainya suatu tujuan yang telah di rencanakan.

Dalam menilai efektivitas program Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang, menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Tiara dan Endang, 2022) dengan mengidentifikasi beberapa variabel utama, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, kejelasan tujuan program, dan pemantauan terhadap pelaksanaannya.

a. Ketepatan sasaran program

Menurut Budiani dalam Kaddafi dan Mutirin (2017), ketepatan tujuan program ditentukan oleh seberapa baik peserta program mentaati tujuan yang telah ditetapkan. . Ketepatan tujuan Program Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, Ketepatan Sasaran Program dalam Pemilihan Kelurahan. Dalam pelaksanaan Program keltana di Kota Padang, keterbatasan anggaran membuat BPBD tidak dapat memfasilitasi seluruh kelurahan. Oleh karena itu, BPBD harus memilih kelurahan yang paling sesuai dengan sasaran program. Pemilihan kelurahan dalam program ini sangat tepat, dengan prioritas utama diberikan kepada kelurahan yang berada pada zona merah bencana tsunami. Hal ini didasarkan pada isu-isu yang berkembang terkait dengan ancaman megathrust dan potensi bencana tsunami besar yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan program dinilai efektif karena kecamatan terpilih memerlukan perhatian lebih terhadap kesiapsiagaan bencana. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini et al. , 2018) pada tahun 2017 yang berjudul "Efektifitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Silnobojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Pacitan". bahwa sasaran dalam pemilihan program kelurahan tangguh bencana ini adalah karena desa/kelurahan tersebut terletak di daerah yang rawan akan bencana alam atau berada pada zona bahaya bencana, sehingga desa/kelurahan tersebut haruslah diberikan pendampingan tingkat desa untuk dapat mengurangi potensi dampak bencana yang akan terjadi di kemudian hari.

Keselarasn antara temuan di lapangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini dkk, 2018) memperkuat keyakinan bahwasanya Ketepatan sasaran program dalam pemilihan kelurahan lebih memprioritaskan desa/kelurahan yang terdapat pada zona merah atau bahaya bencana sehingga pendampingan yang diberikan akan bisa dimanfaatkan demi keamanan kelurahan tersebut.

Kedua, Ketepatan Sasaran dalam Pelaksanaan program. Ketepatan sasaran suatu program sangat bergantung pada relevansinya dengan kondisi daerah atau kelurahan yang terlibat. Berdasarkan evaluasi, program Kelurahan Tangguh Bencana dinilai sudah tepat sasaran karena menekankan pentingnya kemandirian serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat setempat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi wilayah mereka, sementara BPBD hanya bertindak sebagai pendukung, menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

Dalam hal ini, BPBD Kota Padang mengakomodasi kebutuhan masyarakat berdasarkan partisipasi aktif dari setiap kalangan di kelurahan-kelurahan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian (Aini dkk, 2018) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi terkait bencana.

Selain memastikan relevansi dengan kondisi daerah, BPBD juga berkomitmen untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan temuan penelitian, penyandang disabilitas didata secara detail, termasuk identifikasi siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka jika terjadi bencana. Pendataan ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan tidak ada individu yang terlewatkan dalam pelaksanaan program.

Pelibatan penyandang disabilitas ini sesuai dengan penelitian (Baiq dkk., 2024) yang menyoroti pentingnya resiliensi kelompok disabilitas dalam menghadapi bencana alam. Dalam penelitian tersebut, partisipasi penyandang disabilitas dianggap esensial untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mengurangi risiko bencana bagi kelompok ini.

Jadi, secara keseluruhan, Program Kelurahan Tangguh Bencana telah menysasar wilayah-wilayah yang tepat, terutama kelurahan yang berada di zona merah tsunami, meskipun pelaksanaannya masih terbatas akibat keterbatasan dana dan ancaman megathrust. BPBD tetap menekankan pentingnya kemandirian dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam program ini. Diharapkan, di masa mendatang, cakupan program dapat diperluas ke wilayah lain yang juga berisiko terkena bencana.

b. Sosialisasi Program

Menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutirin (2017), kegiatan ini merupakan kepandaian pihak pelaksana dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas, serta oleh peserta program yang menjadi sasaran utama. Sosialisasi merupakan langkah awal yang paling utama dalam pelaksanaan Program Keltana oleh BPBD Kota Padang.

Terkait sosialisasi dalam pelaksanaan Program Keltana oleh BPBD Kota Padang telah berjalan efektif dan menarik minat banyak kelurahan, bahkan di luar wilayah yang dianggap rawan bencana. Berdasarkan hasil temuan khusus, sosialisasi yang dilakukan BPBD mampu menjaring kelurahan-kelurahan yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program. Bahkan, tanpa adanya sosialisasi formal, beberapa kelurahan telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi. Namun, karena keterbatasan anggaran, BPBD harus melakukan seleksi ketat, memprioritaskan kelurahan yang dinilai akan memberikan dampak terbesar setelah implementasi program.

Meskipun sosialisasi program yang diberikan oleh BPBD telah berjalan efektif, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang sampai saat sekarang ini belum mendapatkan sosialisasi langsung baik dari BPBD maupun dari pemerintah kelurahan setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan peneliti dimana warga dari kelurahan tersebut tidak mengetahui akan adanya program yang diberikan oleh BPBD terkait program kelurahan tangguh bencana, maka dari pada itu BPBD maupun pemerintah setempat harus memastikan masyarakat di kelurahan tersebut sudah mendapatkan informasi terkait dengan program tersebut agar masyarakat di kelurahan tersebut bisa siap maupun bisa mandiri apa bila bencana terjadi.

c. Tujuan Program

Menurut Budiani dalam Kaddafi dan Mutirin (2017), tujuan suatu program dapat ditentukan oleh seberapa besar hasil pelaksanaannya sesuai dengan rencana utama yang telah ditetapkan. Untuk mengkaji tujuan Program Keltana oleh BPBD Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa tujuan program ini telah dipahami dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana pemerintah daerah. Namun, masih

terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program ini secara mendalam. Program ini bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana BPBD menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya mitigasi

Program kecamatan tangguh bencana BPBD Kota Padang bertujuan untuk membangun masyarakat yang mandiri dan mampu menghadapi bencana. Program ini juga memberikan ruang partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi yang didukung dengan pedoman yang jelas yaitu Perka BNPB No. 1 Tahun 2012., serta penilaian berbasis indikator yang memastikan setiap kelurahan memiliki kesempatan untuk berkembang melalui tiga tingkatan pencapaian, yaitu pratama, madya, dan utama.

Keberhasilan program Kelurahan Tangguh Bencana ini diukur tidak hanya melalui tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana indikator-indikator keberhasilan terpenuhi dan dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah program dilaksanakan. Selain itu tujuan utama dalam pelaksanaan program ini juga bisa dilihat pada saat bencana terjadi seperti berapa korban dan kerugiannya yang dialami, maka dari sanalah bisa disebut program tersebut efektif atau tidaknya serta tercapai tidak tujuan program.

d. Pemantauan Program

Menurut Gaddafi dan Mutilin Budiani (2017), pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perhatian kepada peserta program setelah program dilaksanakan. Sebagai bagian dari Program Desa Tangguh Bencana BPBD Kota Padang, evaluasi dan monitoring (monev) memainkan peran penting dalam jaminan keberlanjutan program dan mengukur keberhasilannya. Faktanya, pengurangan risiko akan bencana harus mendapat posisi yang tepat dalam pertimbangan rencana perkembangan di berbagai tingkat, mulai dari yang terendah desa hingga negara bagian (Humaedi, 2016).

Menurut Arens dan Lorbbecke dalam Saras Setyawati (2018), efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Artinya efektivitas merupakan ukuran konsistensi hasil dengan apa yang telah menjadi poin tujuan dan telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan program Kelompok Siaga Bencana (KSB) BPBD Kota Padang, rencana tersebut berhasil dilaksanakan.

Salah satu fokus utama dalam upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana (DRR) yaitu pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan, peningkatan, dan pendidikan untuk menciptakan budaya keamanan dan ketahanan di semua tingkatan. Dalam jangka waktu yang panjang, hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan memungkinkan respons yang efektif di berbagai tingkat. (Hana Astuti dan Sudaryono, 2022).

BPBD Kota Padang memiliki peran terbatas dalam pencegahan bencana banjir, disebabkan oleh minimnya program yang secara khusus ditujukan untuk upaya tersebut. Temuan ini berbeda dari penelitian oleh Luthfiana Kusumajati (2016), yang menunjukkan bahwa BPBD berfungsi sebagai pemegang peran utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo. Namun, sejalan dengan penelitian Rina

Sri Widayati (2020), yang menyoroti kurangnya regulasi yang mengatur penanganan bencana banjir, yang mengakibatkan kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini.

Untuk menjamin kesiapan, ada hal utama yang hanya perlu diatasi di desa, dan juga yang perlu ditangani oleh tingkat pusat atau pemerintahan tertinggi setelah desa (Agus Tiani, 2021). Temuan khusus dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program tersebut berhasil dilaksanakan dan berhasil membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di setiap kelurahan, namun hingga saat ini BPBD belum melaksanakan pemantauan atau evaluasi terhadap program secara formal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar yang harus segera diatasi oleh BPBD agar tujuan utama dari Program Keltana dapat tercapai secara maksimal. Dengan dilaksanakannya monev secara berkala, BPBD dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan jangka panjang dari program ini.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang

Jika dilihat dari efektivitas program kecamatan tangguh bencana Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, ada beberapa faktor yang yang berdampak dari program ini ialah: internal maupun eksternal, kata Suranto.

a. Faktor Internal

Pertama, Anggaran Program. Anggaran merupakan rencana pengeluaran yang mendefinisikan tujuan program dan mengaitkan tingkat pengeluaran yang diusulkan untuk memenuhi tujuan tersebut dalam pelaksanaan dan mencapai tujuan program. Cooper dan Schindler (2014) menjelaskan bahwa anggaran yang memadai adalah salah satu faktor kunci keberhasilan suatu program.

Terkait Anggaran dalam pelaksanaan Program Keltana oleh BPBD Kota Padang mengalami keterbatasan merupakan faktor penghambat efektivitas program tersebut. Meski Program Keltana ini sebenarnya layak diterapkan di seluruh kelurahan di Kota Padang, keterbatasan anggaran membuat BPBD hanya dapat mengimplementasikannya di daerah-daerah yang berposisi di Zona Merah Tsunami, sejalan dengan prioritas mitigasi bencana yang diutamakan.

Kedua, Sumber Daya Manusia. SDM adalah aset paling berharga dalam setiap organisasi, termasuk dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana. Kualitas, kuantitas, dan kompetensi SDM secara langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Robbins dan Judge (2012) menekankan pentingnya manajemen SDM yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan Program Keltana oleh BPBD Kota Padang, jumlah personel yang terlibat di bidang ini hanya lima orang, yang dianggap belum memadai untuk menjalankan program secara optimal. Untuk mengatasi kekurangan ini, BPBD bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Kogami, DRR Indonesia, PMI, serta Forum PRB Sumatera Barat, guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ketiga, Fasilitas dan Sarana Program. Fasilitas dan sarana merupakan alat pendukung keberhasilan suatu prosedur yang dilakukan di dalam pelaksanaan program. Menurut Rukmana (2020), keberadaan sarana yang tepat dapat meningkatkan efektivitas respons masyarakat terhadap bencana, serta mempercepat proses evakuasi. Selain itu sarana dan prasarana yang mencukupi harus dapat tersedia dalam mengatasi bencana baik itu pra bencana, saat bencana, maupun juga pasca bencana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Program Keltana ini BPBD menyediakan sarana dan prasarana, tetapi BPBD sendiri menyerahkan hal tersebut langsung ke Kecamatan, dan dalam pelaksanaan program tersebut BPBD selain memberikan pelatihan terkait dengan kelurahan tangguh bencana, tetapi mereka juga diberikan sebuah kebanggaan dengan mendapatkan rompi, uniform baju dan juga sepatu, selain itu mereka juga diberikan bantuan transportasi agar mereka bisa betah berada di program kelurahan tangguh bencana ini.

b. Faktor Eksternal

Program Keltana ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat akan bencana. Menurut Rinaldi (2024), regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur dan penyediaan dana untuk program mitigasi sangat penting untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi bencana. Kebijakan yang konsisten dapat memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi dan organisasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan Program Keltana di Kota Padang berhubungan langsung dengan IKU PJO Walikota Padang waktu itu Buya Mahyeldi dan Hendir Septa. Oleh sebab itu BPBD juga mendapat kemudahan untuk dapat melaksanakan program tersebut. Maka dari pada itu dapat kita lihat bahwasanya pemerintah juga memiliki peran penting dalam program ini serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti: DRR Indonesia, PMI, Forum Sumbar, Kelompok Siaga Bencana, Depo Pertamina, PT Wilmar juga juga mensupport akan keberlanjutan program Kelurahan Tangguh Bencana ini juga menjadi modal untuk keberlanjutan program ini kedepannya.

SIMPULAN

Program Keltana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang menunjukkan tingkat efektivitas yang sedang. Meskipun program ini telah berhasil menyasar daerah-daerah rentan dan melibatkan partisipasi masyarakat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pendanaan yang tidak memadai telah membatasi jangkauannya, dan kekurangan personel telah menghambat pelaksanaannya secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya pemantauan dan evaluasi formal mempersulit penilaian dampak jangka panjang program. Meskipun terdapat keterbatasan, program ini telah menumbuhkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitasnya meliputi keselarasan tujuan program dengan kebutuhan masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas program, penting untuk mengatasi kesenjangan

pendanaan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, F., & Martin, A. (2022). Tinjauan potensi Dan Kebijakan energi surya di Indonesia. *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material*, 6(1), 43-52.
- Agusintadewi, N. K. (2018).Rekonstruksi Kota-Kota Pesisir Di Wilayah Rawan Bencana: Belajar dari Chile. *Jurnal Arsitektur dan Kota*, 12(2).
- Aini, N., Ulfah, I. F., & Afala, L. M. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Journal of Governance and Policy*, 4(2), 50-61.
- Ardania, B. D. S., Solikatun, S., & Juniarsih, N. (2024, June). Resiliensi Kelompok Disabilitas Terhadap Bencana Alam di Desa Pemenang Barat Pasca Pemberdayaan LSM KONSEPSI. *In Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 2, No. 1, pp. 265-285).
- Alhadi, Z. (2019). Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 50-59.
- Blumberg, B., Cooper, D., & Schindler, P. (2014). Ebook: *Business research methods*. McGraw Hill.
- Bungin, Burhan. 2020. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-KualitatifMix Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. I. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Fatharani, L. M. R. (2023). *Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hariandja, T. R., & Suphia, S. (2019). Efektivitas Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) bagi Masyarakat Miskin di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 95-106.
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Lkis Pelangi Aksara.
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 327-362.
- Kinasih, H. W., & Rukmana, R. H. (2021). Dampak Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Yang Dimoderasi Oleh Pertambahan Kasus Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Kusumajati, L., & Sri Arfiah, S. H. (2016). Peranan Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Murdiaty, M., Angela, A., & Sylvia, C. (2020). Pengelompokan Data Bencana Alam Berdasarkan Wilayah, Waktu, Jumlah Korban dan Kerusakan Fasilitas Dengan Algoritma K-Means. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(3), 744-752.

- Partuti, T., & Umyati, A. (2019). Pengenalan Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi Untuk Siswa Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 6(1).
- Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Organizational behavior 15th edition*. Prentice Hall.
- Setiyowati, T. T., & Indartuti, E. (2022). Efektivitas Program Kalimasada Di Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(02), 113-117.
- Salsabila, H., & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana Oleh Bpbd Kota Padang. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 11(2), 249-255.
- Syla, A., Rinaldi, A., Parra, D., & Patel, M. K. (2024). *Optimal capacity planning for the electrification of personal transport: The interplay between flexible charging and energy system infrastructure*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 192, 114214.